



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2023

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah untuk Tahun Anggaran 2023

Penyusunan lakip sebagai laporan tahunan ini mengacu pada Rencana Strategik Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur oleh Lembaga Administrasi Negara.

Dalam laporan ini disajikan seluruh hasil pelaksanaan program kerja dibidang Perindustrian pada tahun anggaran 2023 dalam bentuk data dan gambar disertai dengan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Pembuatan laporan ini juga merupakan salah satu pendukung terwujudnya laporan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah.

Sebagai penyusun tentunya juga mengharapkan adanya *feed back* baik berupa saran maupun kritik membangun demi usaha kita untuk mewujudkan *good governance* khususnya dibidang Perindustrian di Kabupaten Lampung Tengah.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini, semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terbina sampai kelak dikemudian hari dan apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT.

Gunung Sugih, Januari 2024
Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Lampung Tengah,



Drs. THOHERHAN, M.Si
NIP. 19720527 199303 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Metode Penyusunan	3
F. Gambaran Umum	4
1. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Instansi.....	4
2. Sumber Daya Manusia (SDM).....	5
3. Sumber Daya Keuangan.....	5
4. Issue Strategis	6
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategik	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja	15
B. Realisasi Anggaran	43
IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

DAFTAR TABEL

1. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
2. Tingkat pencapaian kinerja sasaran tahun 2023
3. Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2023
4. Pengukuran kinerja kegiatan (PKK) tahun 2023
5. Produksi Komoditi sektor Perindustrian
6. Daftar Target dan Realisasi PDA sektor Perindustrian
7. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Perindustrian
8. Akuntabilitas keuangan berupa LRA dan Neraca 2023

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bagan Organisasi Dinas Perindustrian Kab. Lampung Tengah
2. Penetapan Kinerja (PK) tahun 2023
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2023
5. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2023
6. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023
7. Rencana Strategik tahun 2021 – 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas perindustrian merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terbentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang Undang nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP).

Dinas Perindustriaan merupakan unsur pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang mempunyai tugas pokok di bidang Perindustian. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Perindustrian berkewajiban untuk menyiapkan laporan kinerja secara tertulis dan melembaga yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang dibebankan dalam bentuk laporan instansi pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber

daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah.

Analisis capaian kinerja / permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 – 2026.

B. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Desember 2023;
6. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 Desember 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan tahunan / LAKIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam Tahun Anggaran 2023

Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah.

Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam Tahun Anggaran 2023 serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dimasa mendatang dan sekaligus sebagai bahan laporan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah dalam Tahun Anggaran 2023.

D. Ruang Lingkup

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mencakup pelaksanaan kegiatan dan program kebijaksanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebagai realisasi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

E. Metode Penyusun

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah disajikan dalam 4 (empat) BAB, yaitu :

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II Perencanaan Strategis

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran

F. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021, gambaran umum Dinas

Perindustrian adalah:

1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

a. Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian
- d. Pelaksanaan administrasi dinas perindustrian
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 1. Keadaan SDM Aparatur Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Pangkat dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV	4	4	8
2	III	4	8	12
3	II	4	1	5
4	I			

Tabel 2. Keadaan SDM Aparatur Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Pendidikan Formal

	Pendidikan Formal
--	-------------------

No	Gol	Pasca Sarjana		Sarjana (S1)		Sarjana Muda (D III)		SLTA		SLTP		Jml	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	IV	4	4					-	-	-	-	8	
2.	III			4	8	-	-	-	-	-	-	12	
3.	II	-		-	-	1	-	3	1	-	-	5	
4.	I	-		-		-		-	-	-	-	-	
Jumlah ..		4	4	4	8	1		3	1	-		25	

3. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3. Sumber daya keuangan tahun anggaran 2023

Sumber Dana	Anggaran (Rp.)
APBD	
Belanja Pegawai	2.872.024.054
Belanja Barang dan Jasa	2.346.233.300
Belanja Hibah	2.327.000.000
Belanja Modal	4.000.000
Jumlah	7.549.257.354

4. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah ada beberapa kendala, diantaramya:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha belum semuanya baik
2. Kemasan produk IKM masih banyak yang belum berstandarisasi
3. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perindustrian baik secara kuantitas maupun kualitas.
4. Belum luasnya akses pasar

5. Keterbatasan modal usaha
6. Kemampuan dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan masih lemah

1. Isu-isu Internal

- a. Terbatasnya ketersediaan tenaga fungsional khususnya tenaga penyuluh lapangan dibidang industri kecil dan menengah.
- b. Terbatasnya ketersediaan buku-buku juklak/juknis dan jurnal-jurnal di bidang industri kecil dan menengah.
- c. Penyusunan laporan kemajuan IKM belum maksimal.
- d. Pemuktahiran data industri masih dalam proses pemuktahiran.

2. Isu-isu Eksternal

- a. Kualitas produk industri kecil yang dihasilkan pengrajin masih belum siap bersain dalam permintaan pasar.
- b. Kerjasama/ kemitraan usaha-usaha kecil dengan industri besar belum berjalan secara maksimal.
- c. Kualitas sumber daya manusia di bidang industri kecil dan menengah masih perlu ditingkatkan baik dalam aspek teknis maupun dalam kemampuan manajerial.
- d. Kesulitan modal usaha dan akses pasar dalam menjual produk-produk yang dihasilkan.
- e. Dukungan insfrastruktur yang masih perlu ditingkatkan.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah juga Visi dan Misi semua Dinas

Visi : Lampung Tengah Maju, Aman, adil dan Sejahtera

Misi : Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya taraf Kesehatan, Pendidikan dan kehidupan social budaya masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas insfrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektifitas pergerakan manusia, barang dan jasa.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan.
4. Stabilitas Keamanan.
Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna meningkatkan investasi daerah.
5. Good Governance
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public guna mewujudkan tata Kelola pemetrintahan yang baik (good governance).

Dari 5 (lima) misi di atas yang menjadi misi Dinas Perindustrian adalah misi 3 (tiga) Yaitu “
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKUATAN KETAHANAN PANGAN DAN STABILITAS
HARGA JUAL HASIL PETANI GUNA MENEKAN ANGKA KEMISKINAN .

Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang menyatakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dari misi 3 (tiga) yang menjadi tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung
Lakip 2023 Dinas Perindustrian Lamteng

Tengah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perindustrian.

Sasaran :

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah adalah meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah

Tabel 4. Strategi untuk mencapai Tujuan dan sasaran

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab Data
1	Meningkatnya daya saing dan produktifitas Industri Kecil dan Menengah	Prosentase peningkatan produksi	$\frac{\text{Jumlah produksi tahun } n - \text{Jumlah produksi tahun } n-1}{\text{Jumlah produksi tahun } n-1} \times 100$	Bid. Monitoting dan Pelaporan	Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah
		Persentase IKM yang memiliki standarisasi produk	$\frac{\text{Jumlah Industry Kecil Menengah tahun } n - \text{Jumlah Industry Kecil Menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah Industry Kecil Menengah tahun } n-1} \times 100$	Bid. Industri Kimia agro dan Hasil Hutan	
		Persentase Kontribusi sector industry pengolahan non migas dalam PDRB	$\frac{\text{Jumlah industry pengolahan non migas tahun } n - \text{Jumlah industry pengolahan non migas tahun } n-1}{\text{Jumlah industry pengolahan non migas tahun } n-1} \times 100\%$	BPS	

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tingkat kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang ditargetkan untuk dicapai oleh Dinas Perindustrian dalam Tahun Anggaran 2023 secara lengkap disajikan dalam lampiran.

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya daya saing dan produktivitas Industry Kecil Menengah	-Persentase IKM yang memiliki standarisasi produk - Persentase peningkatan produksi -Persentase kontribusi sector industry pengolahan non migas dalam PDRB	5% 5% 3%

Perjanjian kinerja Kepala Dinas Tahun Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 diimplementasikan melalui 3 (tiga) program utama yang merupakan program prioritas bagi Dinas perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.569.657.489
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.698.185.924
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	54.900.000
	JUMLAH	7.549.257.354

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023, selanjutnya diimplementasikan kedalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dengan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah:

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Nilai A
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	2 kegiatan
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	5 kegiatan
4	Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 Buah
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jenis
6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik negara	32 unit

Tabel 2.4
Program Utama Sekretaris Dinas Perindustrian
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.569.657.489
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 42.499.900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.127.552.054
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 335.268.200
	Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.000.000
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	Rp. 64.320.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 125.575.000
	JUMLAH	Rp. 3.569.657.489

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka
Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPIK yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka pada Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) program utama yang menunjang program-program Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Program Utama Kepala Bidang Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka
Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

NO	Program/Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 1.345.000.700
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 1.345.000.700
	JUMLAH	Rp. 1.345.000.700

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) program utama yang mendukung program-program Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Bidang Industri Kimia Agro dan hasil Hutan
Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rencana pembangunan	3 kegiatan

		industri	
--	--	----------	--

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang IKAHH Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 diimplementasikan melalui 1 (satu) program utama yang menunjang program-program Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Tabel. 2.8.
Program Utama Kepala Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 2.370.141.300
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 2.370.141.300
	JUMLAH	Rp. 2.370.141.300

Tabel. 2.9.
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan
Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi industri	1 Dokumen

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) program utama yang menunjang program-program Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Program Utama Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan
Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp. 54.900.200
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 54.900.200
	JUMLAH	Rp. 54.900.200

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Perindustrian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Meningkatnya Daya Saing dan Produktifitas Industri Kecil Menengah	1. Persentase IKM yang telah memiliki standarisasi	persen	5	5	100
		2. Persentase Peningkatan Produksi	persen	5	5	100
		3. Persentase Kontribusi Sector Industri Pengolahan Non Migas dalam PDRB	persen	3	2,05	68,3
		Capaian Rata-Rata				

Dari Perjanjian Kinerja Eselon 2 terhadap 3 indikator kinerja dengan masing-masing capaian kinerja sebesar 100 persen.

Tabel 3.2.
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Terlaksananya Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	B	A	100
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	2	2	100
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	5	5	100
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	4	4	100
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Bulan	12	12	100

6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional, pemeliharaan peralatan dan mesin serta pemeliharaan Gedung kantor	Unit	32	32	100
---	---	---	------	----	----	-----

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa sasaran pertaman yaitu Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan realisasi nilai A dari target nilai B. Sasaran pertama mencapai nilai A dikarenakan adanya dukungan yang baik dalam melaksanakan kegiatan Dinas Peindustrian Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sasaran kedua yaitu Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terlaksana dengan baik.
3. Sasaran ke tiga yaitu Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indicator Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah terealisasi 5 sub kegiatan dengan target 5 sub kegiatan.
4. Sasaran ke empat yaitu Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dengan indicator Jumlah pengadaan barang milik daerah yang realisasi 4 buah dari target 4 buah.
5. Sasaran ke lima yaitu Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan indicator jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terealisasi dalam 12 bulan dengan target 12 bulan.

6. Sasaran keenam yaitu Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indicator Jumlah pemeliharaan barang milik daerah terrealisasi 32 unit dengan target 32 unit.

Tabel 3.3.

Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2023			Capaian (%)
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPIK yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	95%
2	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi industry yang ada di SIINas	Dokumen	1	1	100

Dari 3 (tiga) program utama , Kepala Bidang ILMEA Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan 1 kegiatan yaitu Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan indicator jumlah dokumen RPIK yang telah ditetapkan dengan PERDA terealisasi 1 dokumen dengan

target 1 dokumen, capaian persentasenya di nilai 95% dikarenakan masih dalam proses pengesahan Perdanya.

Tabe. 3.4.

Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Industri Kimia Agro dah Hasil Hutan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPIK yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	95

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri yaitu melaksanakan pembinaan dan pelatihan Pembuatan Jamu Instan bagi 60 IKM yang dilaksanakan di Kecamatan Bangunrejo kampung Bangunrejo , Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yaitu melaksanakan kegiatan pemberian bantuan alat produksi kepada IKM olahan pangan dan kerajinan , memeberikan bingtuan hibah uang kepada IKM dan Kelompok Bersama dibawah binaan Dinas Perindustrian , memberikan bantuan fasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Lampung Tengah yang di berikan kepada 10 IKM berupa sertifikat halal produk olahan pangan, dan telah diberikan pelatihan dari LPPOM MUI propinsi Lampung dan BPJBH/Satgas halal Kemenag Propinsi Lampung. Dari pelatihan yang diberikan diharapkan para pelaku usaha industry kecil dan menengah dapat

menerapkan standar mutu untuk industrinya sehingga dapat bersaing dengan produk kualitas pabrikan dan juga memberikan rasa aman kepada konsumen.

Tabel 3.5.

Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2023			Capaian (%)
			Satuan	Target	Realisasi	
2	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kanupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi industry yang ada di SIINas	Dokumen	1	1	100

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kanupaten/Kota memiliki sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) berupa kegiatan pendataan IKM Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel. 3.6.

Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon IV Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	

			Satuan	Target	Realisasi	
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	2	100
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA_SKPD yang disusun	dokumen	1	1	100
3	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	100
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Laporan	6	6	100
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	laporan	6	6	100
6	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Orang	25	25	100
5	Terlaksananya	Jumlah	jenis	8	8	100

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				
6	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik yang disediakan	paket	1	1	100
7	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	1	100
8	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	4	4	100
9	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	4	100
11	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan rapat dan koordinasi	Laporan	242	24	100
12	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan	Jumlah pengadaan peralatan dan	buah	4	4	100

	Mesin Lainnya	mesin lainnya milik daerah				
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah ketersediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	unit	4	4	1001
15	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	27	27	100
16	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	gedung	1	1	100
17	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan	dokumen	2	2	100

	Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	4	4	100
18	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	4	4	100
21	Terlaksananya Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Fasilitas	dokumen	1	1	100

Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
--	--	--	--	--	--

Perjanjian Kinerja Eselon IV dari 22 indikator seluruhnya tercapai dengan baik karenanya rencana dan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan baik dan tepat waktu.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel. 3.7.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
			realisasi	realisasi	realisasi	realisasi
1	Meningkatnya Daya Saing dan Produktifitas Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang memiliki standarisasi	5%	5%	5%	5%
		Persentase	5%	5%	5%	5%

		Peningkatan produksi				
		Persentase Kontribusi sector Industri Pengolahan Non Migas dalam PDRB	N/A	3,18%	0,55%	2,05%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Persentase peningkatan IKM yang berstandarisasi dari target yang ditetapkan sebesar 5% pada tahun ini bisa tercapai, keberhasilan ini dikarenakan adanya perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik dan tepat waktu.
 2. Persentase peningkatan produksi dari target yang ditetapkan sebesar 5% pada tahun ini bisa tercapai, keberhasilan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan pelaku IKM dalam pengolahan serta bertambahnya permintaan pasar, adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah kepada pelaku IKM.
 3. Persentase peningkatan kontribusi non migas dalam PDRB dari target yang ditetapkan sebesar 3% pada tahun ini hanya tercapai 2,05%, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah baik yang positif maupun negatif, kurangnya kualitas SDM yang berperan penting dalam produktifitas industri manufaktur.
3. Perbandingan Target dan Realisasi Program Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Tabel. 3.8.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target Renstra	Realisasi PK	Capaian (%)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Daya Saing dan Produktifitas Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan IKM yang berstandarisasi	5%	5%	100%
		Persentase Peningkatan Produksi	5%	5%	100%
		Persentase Kontribusi sector Industri Pengolahan Non Migas dalam PDRB	3%	2,05%	68%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam mewujudkan sasaran strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah , capaian pada indikator persentase peningkatan hasil industri rata-rata mencapai 100%. Keberhasilan capaian pada indicator tersebut karena adanya dukungan dari fackor perencanaan dan palaksanaan kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Standart Nasional

Tabel 4.1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi PK	Standart Nasional/Provinsi	Ket
1	Meningkatnya daya saing dan Produktifitas Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan IKM yang berstandarisasi	5%	5,7%	Nasional

		Persentase peningkatan produksi	5%	6%	Nasional
		Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas	2,05%	1,8%	Provinsi

Dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk persentase peningkatan IKM yang berstandarisasi sudah mendekati target Nasional sebesar 5,7% dari capaian Kabupaten Lampung Tengah sebesar 5% ada perbedaan 0,7%.

Untuk persentase peningkatan produksi sebesar 5% juga sudah mendekati target capaian nasional sebesar 6% ada perbedaan sebesar 1%.

Pada indikator terakhir yaitu persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas sebesar 2,05% jika dibandingkan dengan capaian target Provinsi Lampung sebesar 1,8% maka capaian kabupaten Lampung Tengah diatas atau melampaui Propinsi Lampung.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan Kinerja dan Solusi

Keberhasilan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 dapat ditunjukkan dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 dan tabel 3.4. Dari sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

a) Indikator pertama : Persentase peningkatan Industri Kecil dan Menengah yang berstandarisasi.

Sasaran strategis adalah meningkatkan daya saing dan produktifitas Industri Kecil dan Menengah. Indikator ini didukung oleh program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Berdasarkan Kementerian Perindustrian Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran penting dalam perekonomian strategis. Pada tahun 2023 populasi pertumbuhan IKM mengalami peningkatan sebesar 976 IKM dari target 173 IKM. Hal ini memberikan dampak yang luas bagi perekonomian. IKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan juga berperan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Program pengembangan IKM yang berstandarisasi juga telah meningkatkan kapasitas produksi.

Dengan adanya IKM yang berstandarisasi maka kualitas produk meningkat dan dapat bersaing di pasaran. Upaya IKM berstandarisasi bertujuan untuk memperkuat sektor IKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

b) Indikator Kedua : Persentase peningkatan produksi

Proses peningkatan produk IKM melalui tahapan terutama mengenai pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada sekaligus pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap produk lama dengan mengkoversionya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk IKM memahami kebutuhan dan keinginan pasar.

Adapun tujuan pengembangan produk itu sendiri adalah memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan dengan produk inovatif, produk yang dimodifikasi, serta produk yang memiliki nilai tinggi dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merk dan ciri-ciri lainnya.

Peningkatan persentase produk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- Mengoptimalkan kualitas produk .

Kualitas produk yang baik akan meningkatkan kepuasan konsumen dan memperkuat citra merk, terutama fokus pada peningkatan kualitas bahan, desain dan proses produksi.

- Analisis Tren Pasar.

Memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen dapat membantu mengarahkan perkembangan produk. Produk yang relevan dengan tren akan lebih diminati.

- Pembaruan Regular Produk.
Terus memperbarui produk dengan fitur baru, perbaikann atau peningkatan dapat mempertahankan minat pelanggan dan mengikuti perkembangan teknologi.
- Kolaborasi dengan Influencer.
Kolaborasi dengan influencer atau tokoh terkenal dapat meningkatkan visibilitas produk dan memperluas jangkauan produk.
- Personalisasi Komunikasi.
Berinteraksi dengan konsumen secara pribadi dan memahami kebutuhan mereka membantu menghasilkan produk yang lebih relevan dan disukai.
- Menciptakan program Referral .
Hal ini dapat mendorong konsumen untuk merekomendasikan produk kepada orang lain sehingga dapat meningkatkan penjualan.
- Kekola Stock dengan Efisiensi.
Memastikan ketersediaan produk yang cukup dipasaran dan menghindari kekurangan stock membantu kepercayaan konsumen.
- Meningkatkan Sarana Produksi.
Sarana produksi berupa alat atau mesin yang menunjang proses produksi sangat diutamakan. Dengan penggunaann alat atau mesin yang sudah modern dapat membantu meningkatkan produk yang dihasilkan kaena dapat mengefisiensikan waktu dan tenaga dan jumlah produk yang dihasilkan serta kualitas produk.

c) Indikator Ketiga : Persentase peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non migas dalam PDRB

Kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

- Adanya kebijakan pemulihan ekonomi pemerintah.
Kebijakan strategis pemerintah seperti insentif fiskal dan non fiskal membantu mendongkrak produktifitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Strategi fiskal berupa peningkatan investasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekomoni.Penguatan SDM pelaku industri dengan melakukan pelatihan dan pendidikan.

Kebijakan non fiskal berupa penetapan harga eceran (HET) yang bertujuan untuk melindungi stabilitas ekonomi.

Adanya penerapan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) membantu para IKM/UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena fokus ke produk lokal dan wajib dilaksanakan.

- Integrasi Teknologi.

Penggunaan Teknologi di sektor industri dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan produktifitas.

Persentase peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non migas tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,05%. Peningkatan ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3%.

Upaya peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non migas didukung oleh program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri dengan pemberian bantuan alat / mesin produksi olahan pangan dan kerajinan bagi IKM binaan Dinas Perindustrian sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi , kualitas produk dan juga mengurangi biaya operasional sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah.

Keberhasilan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah untuk kinerja tahun 2023 dapat ditunjukkan dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 3.1 dan 3.8. dari sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yaitu meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan daerah yang diukur dari indikator-indikator sasaran, yang mencapai persentase sebesar 100% maupun dari capaian target realisasi program kerja utama yang mencapai persentase 100%, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun 2023 telah berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Perindustrian
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Program Kerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Daya Saing dan Produktifitas Industri Kecil	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	100%	97,45%	2,55%
	Program Pengelolaan Sistem informasi Industri Nasional	100%	92,38%	7,62%

Berdasarkan tabel diatas Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sepanjang tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kerja utama dengan capaian sangat memuaskan terlihat dari pencapaian indicator rata-rata 95,44% .

Terlaksananya Indikator Kinerja persentase IKM yang memiliki standarisasi didukung oleh program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Terlaksananya Indikator Kinerja persentase peningkatan produksi juga di dukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Pada indikator kinerja ketiga yaitu Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas juga didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.

7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

- a. Indikator persentase peningkatan IKM yang berstandarisasi didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan capaian program sebesar 97,45%, keberhasilan ini didukung oleh perencanaan dan kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
- b. Indikator persentasi peningkatan produksi juga didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan capaian program sebesar 97,45%, keberhasilan ini didukung oleh perencanaan dan kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, serta adanya bantuan sarana produksi olahan pangan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah kepada pelaku industri.
- c. Indikator persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas pun didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, namun pada indikator ini belum mencapai target kinerja dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah, rendahnya industri manufaktur dan kemampuan SDM yang kurang memadai .

Perkembangan-perkembangan jumlah unit usaha, nilai investasi dan nilai produksi Industri Kecil menengah tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.10.

Perkembangan Jumlah Industri Agro dan Kimia tahun 2022-2023

No	Uraian	2022	2023
----	--------	------	------

1	Perusahaan Kimia,Agro dan Hasil Hutan	2.842	3.717
2	Perusahaan Logam Mesin , Elektronika dan Aneka	1.270	1.218
3	Perusahaan Lainnya	-	153
	JUMLAH	4.163	5.088

Dari analisis perkembangan jumlah industry Agro pada tahun 2022 - 2023 terdapat peningkatan yaitu dari 2.842 menjadi 3.717 sehingga ada kenaikan sebanyak 874 IKM.

Dan perkembangan jumlah industri Logam mesin Elektronika dan aneka mengalami penurunan yaitu dari 1.270 menjadi 1.218 sehingga ada penurunan sebanyak 52 IKM. Sementara untuk industri lainnya mengalami peningkatan sebanyak 153 IKM.

Tabel. 3.11.

Perkembangan-perkembangan Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi dan Nilai Produk Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022-2023

Uraian	Unit Usaha		Nilai Investasi (Rp)		Nilai Produksi (ton/unit/thn)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
IKAHH						
Besar	38	-	1.748.470.265.958	1.748.470.265.958	19.807,5	1.613.973,60
Menengah	7	-	40.901.000.000	40.901.000.000	9.000,00	9.000,00
Kecil	2.842	3.717	30.673.844.212	30.673.844.212	220.245.019,40	220.245.019,40
Jumlah	2.887	3.717	1.820.045.110.170	1.820.045.110.170	221.867.993,00	221.867.993,00
ILMEA						
Besar	5	-	5.400.000.000	5.400.000.000	2.355	2.355
Menengah	1	-	-	-	1.456	1.456
Kecil	1.270	1270	12.629.095.000	12.629.095.000	3.196.66	3.196.66
Jumlah	1.276	1276	18.029.095.000	18.029.095.000	7.007.66	7.007.66 unit

					unit	
Sub Total						
Besar	42	-	1.615.406.287.734	1.753.870.265.958	19.897 ton	1.613.973,60 ton/2.355 unit
Menengah	8	-	30.689.008.000	40.901.000.000	622.556 ton	9.000,00 ton/1.456 unit
Kecil	4.112	3.	22.623.430.000	43.302.939.212	292.200 ton/106.323 unit	220.245.019,40 ton/3.196.66 unit
Total	4163	4163	1.668.718.717.734	1.838.074.205.170	934.563,5 ton/106.323 unit	242.104.248 ton/7.007.666 unit

Keterangan :

IKAHH : Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan

ILMEA : Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

Dari data diatas, Dinas Prindustrian Kabupaten Lampung Tengah mempunyai sasaran yang hendak dicapai yaitu Meningkatnya Daya Saing Industri dan Produktivitas Industri Kecil dan Menengah. Indikator-indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Persentase IKM yang telah memiliki standarisasi.

Dinas Perindustrian mempunyai 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan capaian kinerjanya adalah 96,50% jika dibandingkan dengan target, hal ini dikarenakan didukung oleh perencanaan kegiatan yang baik serta pelaksanaan kegiatan yg tepat waktu.

2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri capaian kinerjanya adalah 97,45% jika dibandingkan dengan target, hal ini dikarenakan didukung oleh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang baik dan tepat waktu. Dari program ini menghasilkan peningkatan Industry Kecil dan Menengah yang mendapatkan

bantuan alat produksi dan kerajinan sehingga mempunyai manfaat dalam peningkatan produksi yang dihasilkan dan berdampak juga pada peningkatan pendapatan/income para pelaku industry.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional capaian kinerjanya adalah 92,38% jika dibandingkan dengan target, hal ini dikarenakan didukung oleh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang baik dan tepat waktu, meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia terutama dalam mengelola sistem/aplikasi yang digunakan dalam memantau serta menganalisis data industry. Dari program ini menghasilkan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang cukup tinggi serta dari data SIINas adanya penambahan perusahaan yang melakukan laporan semesteran .

B. Realisasi Anggaran

Tabel. 3.12.

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Perindustrian
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan(Rp)	Belanja		Keuangan(%)	Fisik (%)
		Realisasi	Sisa Anggaran		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.699.215.154	3.569.657.489	129.557.665	96,50	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.499.900	35.777.450	6.722.450	84,18	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan	9.776.400	8.244.200	1.532.200	84,33	100

Perangkat Daerah					
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	7.717.600	7.717.600	0	100	100
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	19.459.000	19.459.000	0	100	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000	500.000	0	100	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.000.0001	19.000.000	0	100	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7.600.000	7.600.000	0	100	100
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.000.000	2.000.000	0	100	100
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000	6.000.000	0	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	22.026.000	22.026.000	0	100	100
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	10.726.000	10.726.000	0	100	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000	500.000	0	100	100
Belanja Makanan dan	10.800.000	10.800.000	0	100	100

Minuman Rapat					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.182.000	58.826.000	356.000	99,4	100
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	16.322.000	16.322.000	0	100	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	450.000	450.000	0	100	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.460.000	16.104.000	356.000	97,84	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.950.000	25.950.000	0	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.903.418.332	2.884.965.429	18.452.903	99,36	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.427.450.332	2.408.997.429	18.452.903	99,2	100
Belanja Gaji Pokok PNS	1.177.350.022	1.175.655.400	1.694.622	99,86	100
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	119.120.351	118.951.090	69.2611	99,86	100
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	164.344.348	164.101.048	243.300	99,85	100
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.769.100	20.740.000	29.100	99,86	100
Belanja Tunjangan Beras PNS	77.237.378	77.127.300	110.078	99,86	100
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.043.489	2.040.156	3.333	99,84	100
Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.498	16.474	24	100	100

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	866.569.146	850.365.961	16.203.185	98	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	475.968.000	475.968.000	0	100	100
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	185.760.000	185.760.000	0	100	100
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.680.000	34.680.000	0	100	100
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000	72.000.000	0	100	100
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.000.000	60.000.000	0	100	100
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000	72.000.000	0	100	100
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000	36.000.000	0	100	100
Belanja Jasa Tenaga Supir	12.000.000	12.000.000	0	100	100
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.528.000	3.528.000	0	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.857.700				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.149.400	6.149.400	0	100	100
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.149.400	6.149.400	0	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.687.700	4.687.700	0	100	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.687.700	4.687.700	0	100	100
Penyediaan Bahan	70.525.100	70.445.100	80.000	99,88	100

Logistik Kantor					
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	40.618.800	40.538.800	80.000	99,8	100
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	17.425.900	17.425.900	0	100	100
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	12.480.400	12.480.400	0	100	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.151.500	32.150.900	600	99,99	100
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	32.151.500	32.150.900	600	99,99	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	30.600.000	30.600.000	0	100	100
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	30.600.000	30.600.000	0	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.744.000	262.849.867	5.894.133	97,81	97,81
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.400.000	22.400.000	1.000.000	95,73	95,73
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	235.744.000	235.499.867	244.133	99,89	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.600.000	4.950.000	4.650.000	51,56	51,56
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan	237.874.000	229.815.590	8.058.410	96,61	100

Pemerintah Daerah					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.874.000	229.815.590	8.058.410	96,61	100
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.024.000	6.024.000	0	100	100
Belanja Modal Alat Pendingin	20.000.000	19.970.000	30.000	99,85	100
Belanja Modal Alat Dapur	4.200.000	4.200.000	0	100	100
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	55.000.000	54.669.000	331.000	99,4	100
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	7.700.000	7.700.000	0	100	100
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	4.900.000	4.900.000	0	100	100
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	19.550.000	19.423.890	126.110	99,35	100
Belanja Modal Personal Komputer	97.500.000	89.980.000	7.520.000	92,29	100
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	100	100
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	18.000.000	17.948.700	51.300	99,7	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.200.000	19.813.077	17.386.923	53	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000	19.813.077	17.386.923	53	100
Belanja Tagihan Listrik	13.200.000	10.807.704	2.392.296	81,87	100
Belanja Kawat/Faksimili/Internet /Tv	24.000.000	9.005.373	14.994.627	37,5	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	86.340.000	86.224.270	115.730	99,86	100

Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.340.000	86.224.270	115.730	99,86	100
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	78.340.000	78.308.050	31.950	99,96	100
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua	8.000.000	7.916.220	83.780	98,95	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.310.000	18.310.000	0	100	100
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	12.820.000	12.820.000	0	100	100
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.490.000	5.490.000	0	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.000.000	53.983.500	16.500	99,97	100
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	54.000.000	53.983.500	16.500	99,97	100
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.344.652.500	1.266.788.562	77.863.938	94,2	100
Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi	1.344.652.500	1.266.788.562	77.863.938	94,2	100

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	922.993.500	891.776.350	31.217.150	96,62	100
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	675.000.000	675.000.000	0	100	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alata Tulis Kantor	6.748.000	6.748.000	0	100	100
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	12.790.500	12.418.350	372.150	97,1	97,1
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	0	100	100
Belanja Barang Untuk diberikan/diserahkan kepada Masyarakat	164.225.000	146.120.000	18.105.000	88,97	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000	8.590.000	2.610.000	76,7	76,7
Honorarium Narasumber atau	21.700.000	21.700.000	0	100	100

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.080.000	4.940.000	1.140.000	81,25	81,25
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.750.000	15.760.000	8.990.000	63,67	63,67
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	421.659.000	375.012.212	46.646.788	88,92	100
Belanja Bahan-bahan Lainnya	11.110.000	0	11.110.000	0	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alata Tulis Kantor	7.016.000	6.991.000	25.000	99,64	100
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	17.780.500	15.027.000	2.753.500	84,51	84,51
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000	900.000	0	100	100
Belanja Barang Untuk diberikan/diserahkan kepada Masyarakat	203.600.500	190.420.000	13.180.500	93,53	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.400.000	32.310.000	90.000	99,72	100
Honorarium Narasumber atau	40.050.000	27.900.000	12.150.000	69,66	69,66

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.000.000	18.000.000	0	100	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.802.000	38.034.212	4.767.788	88,86	88,86
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.000.000	45.430.000	2.570.000	94,65	94,65
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	287.999.100	263.025.325	24.973.775	91,3	100
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	287.999.100	263.025.325	24.973.775	91,3	100
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri	170.433.000	146.030.946	24.402.054	85,68	85,68

Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alata Tulis Kantor	724.000	710.000	14.000	98,1	98,1
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	2.275.000	1.272.500	1.002.500	55,93	55,93
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	300.000	0	100	100
Belanja Barang Untuk diberikan/diserahkan kepada Masyarakat	126.250.000	107.350.000	18.900.000	85,03	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	3.040.000	1.760.000	63,33	63,33
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.584.000	21.508.446	1.075.554	95,24	95,24
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000	11.850.000	1.650.000	87,77	87,77
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI,	177.566.100	116.994.379	571.721	99,5	100

IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alata Tulis Kantor	30.697.700	30.646.379	51.321	99,83	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	563.500	563.500	0	100	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.084.500	8.084.500	0	100	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.100.000	1.100.000	0	100	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	70.400	0	70.400	0	0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.950.000	13.950.000	0	100	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	12.800.000	12.800.000	0	100	100
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000	4.500.000	0	100	100
Belanja Sewa Alat kantor Lainnya	1.800.000	1.800.000	0	100	100
Belanja Sewa Bangunan	9.000.000	9.000.000	0	100	100

Gedung Tempat Pertemuan					
Belanja Sewa Motel	8.000.000	8.000.000	0	100	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.000.000	26.550.000	450.000	98,33	98,33
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	517.633.800,-	498.582.075,-	19.051.725	96,32	96,32
Kegiatan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	517.633.800,-	498.582.075,-	19.051.725	96,32	96,32
Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	217.050.800,-	215.446.175,-	1.604.625,-	99,26	99,26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alata Tulis Kantor	25.839.900	25.744.000	95.900	99,63	99,63
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	563.500	563.500	0	100	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.650.000	16.549.900	100.100	99,40	99,40
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000	1.100.000	0	100	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	70.400	70.400	0	100	100

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.450.000	12.450.000	0	100	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia	31.700.000	31.700.000	0	100	100
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000	4.500.000	0	100	100
Belanja Sewa Alat kantor Lainnya	1.800.000	1.800.000	0	100	100
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000	9.000.000	0	100	100
Belanja Sewa Motel	10.500.000	10.000.000	500.000	95,24	95,24
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.377.000	37.768.375	608.625	98,41	98,41
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.500.000	64.200.000	300.000	99,53	99,53
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota	300.583.000,-	283.135.900,-	17.447.100,-	94,19	94,19
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alata Tulis Kantor	8.969.000,-	6.903.000,-	2.066.000,-	76,96	76,96
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.000.000,-	23.968.500,-	31.500,-	99,87	99,87
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.200.000,-	12.560.000,-	640.000,-	95,15	95,15
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000,-	5.700.000,-	2.400.000,-	70,37	70,37
Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia					

Belanja Jasa Penyelenggara Acara	5.000.000,-	5.000.000,-	0	100	100
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.900.000,-	13.700.000,-	1.200.000,-	91,95	91,95
Belanja sewa Alat Kantor Lainnya	67.250.000,-	67.250.000,-	0	100	100
Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	4.000.000,-	4.000.000,-	0	100	100
Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,-	2.925.000,-	75.000,-	97,5	97,5
Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	6.000.000,-	6.000.000,-	0	100	100
Belanja Sewa System/Power Supply	7.500.000,-	5.000.000,-	2.500.000,-	66,66	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109.314.000,-	102.179.400,-	7.134.600,-	93,47	93,47
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.750.000,-	18.300.000,-	450.000,-	97,6	97,6

Seluruh pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sudah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Lembaga Administrasi (LAN) Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2023 ini, penyerapan anggaran tahun 2023 mencapai 7.318.560.908,00 (96,94%) Penyerapan anggaran ini sangat baik, namun pelaksanaan kegiatan lapangan terdapat sedikit pergeseran waktu dikarenakan adanya perubahan kode rekening belanja apabila dikaitkan dengan rencana kerja yang telah disusun. Namun hal ini tidak mengurangi kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan dimuka dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah, maka dalam laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Program / kegiatan /sub kegiatan Dinas Perindustrian yang berasal dari dana APBD Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan. Untuk pencapaian indicator

sasaran pertama tercapai 93,95 %. Sedangkan indicator sasaran kedua tercapai 98,71 %.

Rata- rata capaian kinerja 99% atau dengan predikat kinerja (A).

b. Untuk realisasi keuangan anggaran tahun 2023 Rp. 7.549.257.354,00 terealisasi Rp. 7.318.560.908,00 (96,94%). Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan umpan balik dan sebagai evaluasi bagi pimpinan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah beserta seluruh pegawainya dalam rangka meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

c.

B. Saran

Secara umum, pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah :

1. Mendorong kabupaten dalam mempercepat pertumbuhan sektor industri melalui pengembangan sentra industri unggulan
2. Menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang menghambat daya saing produk IKM, melalui pelatihan dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi produk.
3. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga bersaing, yang nantinya dapat meningkatkan nilai tambah produk industri untuk dijadikan produk ekspor.
4. Meningkatkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.
5. Meningkatkan penerapan pengukuran kinerja secara berjenjang dari eselon III, IV dan staf secara berkala.

